

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018 DI KOTA KUPANG**

David Milanto Pau Gere

Npp 29.1297

*Asdaf Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: milangere5@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on issues related to the Political Participation of Novice voters in the East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor Elections in Kupang City because novice voters have the same rights in participating in politics. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the political participation of novice voters in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor Elections in Kupang City, find out the supporting factors and obstacles to the political participation of novice voters in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor Elections in Kupang City, and also the efforts made by the Kupang City Election Commission in increasing the political participation of novice voters in 2018 East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor Election in Kupang City. **Method:** This research is a qualitative research with a descriptive method using Surbakti theory as the theoretical basis. Data collection is carried out by interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The result obtained by the researchers were the low political awareness of novice voters, seen from the decrease in the level of political participation of novice voters in the 2018 East Nusa Tenggara Governor and Deputy Governor Elections by 60.85%. This is far compared to and the participation rate of novice voters in the 2017 Kupang Mayoral and Deputy Mayoral Elections was 70%. **Conclusion :** Political Diversion of Novice voters in the East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor Elections in Kupang City is still undervalued, this is due to the decline in opposition to the government due to the implementation of arbitrary policies that harm novice voters and have an impact on their political participation. In addition, the daily grind of novice voters so that novice voters prefer to carry out their interests rather than participate in political activities. Efforts have been made by the election commission in increasing the political participation of novice voters in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor elections in Kupang City, but this does not affect the level of political participation of novice voters in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Governor and Deputy Governor elections in Kupang City.

Keywords: *Political Participation, Novice Voters, Gubernatorial Elections*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang karena pemilih pemula memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi politik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang, mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang, dan juga upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teori Surbakti sebagai landasan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Rendahnya kesadaran politik pemilih pemula dilihat dari menurunnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sebesar 60,85%. Hal tersebut jauh bila dibanding dan tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 sebesar 70%. **Kesimpulan:** Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang masih dinilai rendah ini disebabkan kepercayaan terhadap pemerintah yang menurun dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang berubah-ubah sehingga merugikan pemilih pemula dan berdampak pada partisipasi politiknya. Selain itu, kesibukan sehari-hari pemilih pemula sehingga pemilih pemula lebih memilih untuk melaksanakan kepentingan mereka daripada mengikuti kegiatan politik. Upaya telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kota Kupang, namun hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kota Kupang.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Gubernur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tumbuh dikawasan Asia Tenggara dan salah satu bekas jajahan bangsa Belanda. Sebagai negara bekas jajahan yang baru merdeka, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Sistem Demokrasi dipilih dengan pertimbangan bahwa sistem ini lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia daripada sistem yang lainnya. Penerapan sistem demokrasi memberi kesempatan besar bagi pemimpin untuk memimpin dengan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam menyeleksi pemimpin yang akan menyelenggarakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Partisipasi dari rakyat merupakan salah satu faktor penting dari demokrasi, karena keputusan politik yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung mempengaruhi kehidupan rakyat, sehingga rakyat berhak untuk ikut dalam menentukan keputusan dengan mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus membuka seluas-luasnya partisipasi politik masyarakat agar terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Pada prinsipnya, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya dengan ikut serta dalam pemilihan umum, dalam hal ini telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa seorang pemilih merupakan warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam dunia perpolitikan dalam hal ini melalui pemilu.

Rakyat sebagai pemilih memiliki hak langsung untuk memberikan suaranya sesuai dengan keinginan atau hati nuraninya, sehingga rakyat dapat memilih calon pemimpin yang dianggapnya mampu untuk memajukan daerahnya. Proses demokrasi lewat Pemilihan Kepala Daerah diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Proses pembelajaran adalah proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, karena pembangunan manusia tidak sama dengan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau pembangunan gedung tinggi. Partisipasi politik rakyat yang tinggi, akan berdampak positif terhadap proses pembangunan dan selanjutnya hal ini akan menjadi stimulus yang signifikan bagi kemajuan dari masyarakat dan daerah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentunya juga dipengaruhi oleh partisipasi politik pemilih pemula. Partisipasi politik pemilih pemula terkhususnya di Kota Kota Kupang berdampak pada partisipasi pemilih secara keseluruhan. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memberikan hak suaranya dalam pemilu ataupun pilkada, sehingga tentu saja dapat dimanipulasi oleh aktor-aktor politik guna mencari keuntungan. Wawasan tentang hak dan kewajiban politik perlu ditanamkan sejak dini, karena sebagian besar pemilih pemula adalah pemula yang rata-rata berpendidikan. Pemula yang terdidik tentunya dapat menyerap ilmu dan pengetahuan tentang politik dengan sangat mudah sehingga pemilih pemula yang memiliki pengetahuan akan politik tentu saja tidak akan bimbang dan menjadi lebih kritis dalam menentukan pilihan politik. Pemilih pemula yang berwawasan dapat menjadi pendorong terciptanya kehidupan yang lebih demokratis. Pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memiliki peran penting dalam melaksanakan hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum seharusnya bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan pemilih pemula menggunakan hak politiknya dengan bertanggung jawab.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada lima penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu Penelitian Putra Yulianda Purba berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Gubernur di Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui sejauh mana partisipasi pemilih pemula kelurahan simalingkar b berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik dimana pemilih pemula dapat dikategorikan kedalam spectator/. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah dikarenakan rasa ingin tahu dan ada juga kesadaran politik.

Yang kedua yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Eka Santi berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kabupaten Paser. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam memberikan suara, kampanye serta berdiskusi politik dan faktor pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Paser pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Paser berada pada tingkat partisipasi politik sedang. Pemilih pemula yang memiliki pendidikan yang cukup terhadap teori yang telah mereka dapatkan di bangku sekolah sehingga pendidikan sendiri menjadi salah satu faktor pendukung dari partisipasi politik pemilih pemula dalam kegiatan berdemokrasi.

Ketiga yaitu Penelitian dilakukan oleh Marno Wance berjudul Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik dalam menentukan keputusan untuk memilih kandidat pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 dipengaruhi oleh faktor tokoh seseorang dimana hal ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh kandidat.

Yang keempat yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Bruno Carvalho berjudul *Information, Perception, and Electoral Behaviour of Young Voters: A Randomised Controlled Experiment*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak informasi bagi pemilih pemula sebelum Pemilihan Portugal tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa informasi yang ada lebih kuat dampaknya bagi pemilih pemula dimana secara signifikan mempengaruhi pemilih yang awalnya ragu-ragu sehingga lebih rentan terhadap manipulasi..

Yang kelima yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Priscilla Southwell berjudul *Young Voters after the 2008 Election: A disappearing Act*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penurunan partisipasi pemilih pemula antara pemilu tahun 2008 dan 2012. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa para pemilih pemula yang sudah pernah memilih pada pemilu tahun 2008 lebih mungkin untuk mengungkapkan perasaan negative atau skeptif pada pemilu tahun 2012.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Partisipasi Politik dalam berbagai macam perspektif. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang pada tahun 2018.
2. Penelitian ini menggunakan Kerangka Partisipasi Politik dipadukan dengan perundang-undangan yang terkait Partisipasi Politik
3. Penelitian ini menggunakan landasan teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Surbakti tahun 2013
4. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak KPU Kota Kupang dalam meningkatkan Partisipasi Politik pemilih pemula,

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang, mengetahui faktor pendukung dan

penghambat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang, dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 di Kota Kupang..

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Politik Indonesia Terapan. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada lima komponen utama partisipasi politik yaitu Kesadaran Politik, Kepercayaan terhadap pemerintah, Status sosial dan ekonomi, Afiliasi politik orang tua, dan Pengalaman organisasi sesuai yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2013). Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari tiga informan kunci dan enam informan pendukung. Informan kunci yang dimaksud yaitu pertama Ketua KPU Kota Kupang; kedua Anggota Komisioner KPU Kota Kupang; ketiga Kasubbag Teknis dan Hubmas KPU Kota Kupang. Selain informan kunci dalam penelitian ini terdapat informan pendukung yaitu masyarakat pemilih pemula Kota Kupang sebagai informan pendukung yang berjumlah enam orang pemilih pemula.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Ramlan Surbakti (2013).terkait lima komponen partisipasi politik Kesadaran Politik, Kepercayaan terhadap pemerintah, Status sosial dan ekonomi, Afiliasi politik orang tua, dan Pengalaman organisasi , yaitu :

3.1 Kesadaran Politik

Kesadaran politik lebih ditekankan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam proses politik, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut minat seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Terdapat satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesadaran politik pemilih pemula, yakni Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula. Pelaksanaan Pilkada memerlukan partisipasi dari masyarakat terkhususnya pemilih pemula karena hal ini merupakan modal pokok secara kuantitas yang menentukan hasil keberhasilan Pilkada.

Pemilih pemula yang berpartisipasi terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Secara lebih sempit partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada dapat dilakukan dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya secara benar sehingga angka suara tidak sah rendah. Sejauh ini tidak ada ketentuan dalam suatu pemilihan tentang batas partisipasi karena pada hakikatnya secara yuridis, memilih adalah hak bukan kewajiban.

Pemilih pemula terkesan apatis untuk berpartisipasi untuk mengikuti hal yang berkaitan dengan politik. Secara garis besar lebih disebabkan kurangnya peran dan keaktifan pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang sistem politik, sehingga pemilih pemula di Kota Kupang belum memahami dan menghayati betul nilai yang terkandung dalam sistem politik.

3.2 Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah itu menyangkut tentang penilaian seseorang terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah apakah dapat dipercaya dan dapat merealisasikan aspirasi mereka. Untuk menciptakan kepercayaan, pemerintah dapat melakukan pembangunan daerah secara merata serta mengeluarkan kebijakan yang dapat merealisasikan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan Partisipasi pemilih pemula, kepercayaan terhadap pemerintah dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan Pilkada.

kebijakan yang selalu berubah sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula. Pemilih yang baru saja menggunakan hak suaranya, tentu saja memiliki pengetahuan yang belum banyak terkait pemilu. Kebijakan yang terus berubah-ubah tentu akan berpengaruh pada partisipasi pemilih pemula. Pemilih pemula akan merasa seperti dipermainkan dan bingung melakukan sesuatu sehingga nantinya tidak mau lagi berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

3.3 Status sosial dan ekonomi

Status sosial dan ekonomi pada partisipasi politik pemilih pemula dilihat dari tingkat pendidikan pemilih pemula. Dilihat dari pendidikannya, pemilih pemula di Kota Kupang merupakan peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan SMA. Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah, dimana banyak penduduk usia sekolah sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Nilai APM yang bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak diluar jenjang pendidikan

tersebut. Penyebabnya adalah pendaftaran sekolah sejak dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. APK akan lebih rendah dari APM karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang usia yang bersangkutan.

tingkat pendidikan pemilih pemula sudah sesuai dengan jenjang pendidikannya yakni sebagai siswa SMA. Tingkat pendidikan yang sudah sesuai, tidak menjamin partisipasi politik pemilih pemula. Pemilih pemula masih belum sadar untuk berpartisipasi dalam sistem politik sehingga dapat mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kota Kupang.

3.4 Afiliasi politik orang tua

Afiliasi politik orang tua merupakan pengaruh pandangan terkait suatu hal yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, sehingga bisa menyebabkan terpengaruhnya seorang anak terkait pemberian pilihan pada suatu objek. Umumnya bagi pemilih pemula yang baru akan melaksanakan hak untuk memilih yang pertama, cenderung mendengarkan apa kata dari orang sekitarnya atau dari orang tuanya sendiri. Perilaku ini disebabkan karena minimnya wawasan yang dimiliki tentang politik. Afiliasi orang tua dapat diketahui dengan seberapa besar pengaruh korelasi politik orang tua terhadap arah politik anak.

Pemilih pemula di Kota Kupang belum sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Pemilih pemula memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan ataupun hanya ikut teman atau keluarga.

sifat pemilih pemula yang sangat rentan dan masih labil. Dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi, kemudian dari proses sosialisasi pemilih pemula menyerap informasi berupa isu-isu dan tema kandidat, lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dan lainnya. Nantinya pada saat pemilihan, pemilih pemula akan cenderung memilih calon yang diarahkan oleh orang tua maupun keluarga terdekat.

3.5 Pengalaman organisasi.

Kesadaran politik pemilih juga pasti berdampak dari pengalamannya dalam politik. Hal ini selaras karena apabila pengalaman seseorang dalam politik lama maka pemahaman orang tersebut terhadap politik pasti akan baik juga, sebaliknya jika seseorang tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi maka orang tersebut tidak memiliki pengetahuan terkait politik. Berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pemula, pengalaman organisasi dapat dilihat dari sejauh mana keikutsertaan pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan politik atau organisasi politik.

Keterlibatan pemilih pemula di Kota Kupang untuk ikut kepengurusan tim pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun menjadi panitia TPS dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 masih kurang masih dan masih sedikitnya pemilih pemula menjadi panitia dan sukarelawan.

kurangnya minat pemilih pemula untuk ikut menjadi relawan pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 maupun untuk ikut dalam organisasi politik di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain kesibukan sehari-hari sehingga pemilih pemula sulit untuk membagi waktu antara bekerja dengan mengurus politik, serta masih kurangnya minat untuk menjadi sukarelawan dikarenakan pemilih pemula merasa bahwa menjadi sukarelawan bukanlah hal yang menarik.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kota Kupang dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dilihat dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih pemula yang hanya sebesar 60,85%, jauh bila dibandingkan pada pemilihan pada tahun sebelumnya yakni sebesar 70%. Pemilih pemula terkesan apatis untuk berpartisipasi untuk mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan politik. Secara garis besar lebih disebabkan kurangnya peran dan keaktifan pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang sistem politik, sehingga pemilih pemula di Kota Kupang belum memahami dan menghayati betul nilai yang terkandung dalam sistem politik.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa masih rendahnya kesadaran politik pemilih pemula dilihat dari menurunnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Kupang, tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih pemula tahun 2018 sebesar 60,85%. Hal tersebut jauh bila dibanding dan tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 sebesar 70%.

Kepercayaan terhadap pemerintah yang menurun dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang berubah-ubah sehingga merugikan pemilih pemula dan berdampak pada partisipasi politiknya.

Tingkat pendidikan pemilih pemula yang sudah sesuai jenjang umur yakni 17 tahun sehingga hal ini dapat berdampak pada partisipasi pemilih pemula.

Korelasi politik orang tua yang dapat mempengaruhi arah politik pemilih pemula. Pemilih pemula diarahkan untuk memilih sesuai pilihan orang tua, bukan pilihannya sendiri sehingga dapat berdampak menurunnya pada partisipasi politik pemilih pemula

Pemilih pemula yang memiliki pengalaman organisasi dapat memiliki sikap kritis dan berkarakter sehingga berdampak pada partisipasi politiknya

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya kemudahan akses kepada pemilih pemula sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik.
 - 2) Adanya sosialisasi politik yang diberikan kepada pemilih pemula sehingga meningkatkan kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik.
- b. Faktor penghambat
 - 1) Kebijakan yang selalu berubah mengenai sistem pelaksanaan pilkada yang merugikan pemilih pemula sehingga mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula.
 - 2) Kesibukan sehari-hari pemilih pemula sehingga pemilih pemula lebih memilih untuk melaksanakan kepentingan mereka daripada mengikuti kegiatan politik.
 - 3) Pengaruh orang tua yang dapat mempengaruhi pemilih pemula sehingga berdampak menghambat partisipasi politik pemilih pemula.

Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Kota Kupang yang dengan tiga upaya yakni:

- a. Upaya Penguatan melalui penguatan Komisi Pemilihan Umum supaya bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi.
- b. Upaya Rasionalisasi melalui peningkatan citra atau pandangan pemilih pemula akan politik melalui sosialisasi yang gencar.
- c. Upaya Bujukan melalui pelaksanaan kegiatan yang gencar mendekatkan diri dengan pemilih pemula ataupun dengan kegiatan yang disukai sehingga pemberian materi politik dapat diterima dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Partisipasi Politik pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Kupang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal:

- Surbakti, Ramlan. 2013. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo
Purba, P. Y. (2020). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan

Umum Gubernur di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (Studi Kasus: Masyarakat Kelurahan Simalingkar B Medan)"

Santi, R. E. (2020). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Paser" eJournal Pemerintahan Integratif Vol 2 hal 45-67

Wance, M., & La Suhu, B. (2019). "Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)" Jurnal of Government Vol 2 hal 91-115.

Lestari, E. Y. & Arumsari, N. (2018). "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang" Jurnal Integralistik Vol 29 hal 63-72

Setiajid. (2011). "Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Tahun 2009 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang" Jurnal Integralistik. Vol 22 No 1. Hal 20.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum